



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DAN
PENGAWASAN DAN/ATAU PENGENDALIAN PADA KEGIATAN IMPORTASI
MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penilaian pencapaian indikator kinerja utama pencegahan hama dan penyakit ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa hama dan penyakit ikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pencapaian Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pada Kegiatan Importasi Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA EFEKTIVITAS PENCEGAHAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN DAN/ATAU PENGENDALIAN PADA KEGIATAN IMPORTASI MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Pencapaian Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pada Kegiatan Importasi Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN HAMA DAN
PENYAKIT IKAN KARANTINA DAN
PENGAWASAN DAN/ATAU
PENGENDALIAN PADA KEGIATAN
IMPORTASI MEDIA PEMBAWA HAMA DAN
PENYAKIT IKAN KARANTINA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan karantina ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah masuknya HPIK dari luar negeri, mencegah tersebarnya HPIK antar area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah keluarnya HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu, serta mencegah masuk dan tersebarnya agensi hayati, jenis asing invasif dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian wajib dilakukan terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa. Penerapan tindakan karantina ikan terutama terhadap pemasukan media pembawa merupakan salah satu wujud penerapan hak berdaulat Negara Indonesia untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari ancaman serangan masuknya hama dan penyakit ikan berbahaya dari luar negeri serta untuk mencegah dan mengendalikan masuknya jenis ikan dilarang (jenis asing invasif), PRG, SDG dan agensia hayati yang merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati perikanan Indonesia. Hak berdaulat ini dijamin sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian SPS, dan dalam pelaksanaannya mengacu pada kaidah dan standar internasional yang telah ditetapkan. Selain sebagai instrumen perlindungan sumber daya hayati perikanan, pelaksanaan tindakan karantina ikan diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BKIPM memiliki tanggung jawab dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaulat, akuntabel dan

berkelanjutan. BKIPM berperan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan yang berkelanjutan melalui pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di wilayah NKRI. Selanjutnya BKIPM telah menetapkan salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yaitu pelaksanaan operasional tindakan karantina impor yang efektif.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan perkarantinaan ikan, BKIPM dilengkapi dengan Pusat Karantina ikan (Puskari) sebagai unit kerja yang melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan ikan, dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional perkarantinaan ikan. Dengan demikian sasaran strategis pelaksanaan operasional tindakan karantina impor yang efektif menjadi tanggung jawab Puskari dengan indikator kinerja utama (IKU) Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK, dan UPT KIPM dengan IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan. Kemudian untuk memberikan panduan bagi UPT KIPM dan Puskari dalam pencapaian dan pengukuran IKU tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK dan IKU Persentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberi acuan dalam evaluasi, pengukuran, pelaporan dan pencapaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK untuk Puskari, dan IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan untuk UPT KIPM.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. terlaksananya pengumpulan data, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta tercapainya target IKU Efektivitas Pencegahan HPIK dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK di Puskari; dan
2. terlaksananya pengumpulan data, evaluasi, pengukuran dan pelaporan IKU, serta tercapai IKU Persentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan sesuai target di UPT KIPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam petunjuk teknis ini meliputi IKU Puskari dan UPT KIPM, yaitu IKU Efektivitas Pencegahan HPIK dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK dan IKU Persentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan.

BAB II MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. IKU Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK

1. Deskripsi IKU

a. Definisi

- 1) Media pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK;
- 2) Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah negara kesatuan RI yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pengukuran efektivitas pencegahan HPIK, dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada kegiatan importasi Media Pembawa HPIK dilakukan dengan melihat:
 - a) Kesesuaian tindakan karantina, dan
 - b) Kesesuaian penerbitan dokumen akhir

b. Formula

Rumus perhitungan capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK, yaitu:

$$E = (B/A) \times 100\%$$

E = persentase efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK

A = jumlah sampel dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor yang diverifikasi

B = jumlah sampel dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor yang memenuhi persyaratan karantina, media pembawa dikenakan tindakan karantina impor dan diterbitkan dokumen karantina yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan

2. Pengukuran Capaian IKU Efektivitas Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK

a. Dokumen yang dievaluasi sebagai sumber data capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK mengacu pada permohonan pemeriksaan karantina (PPK) yang diajukan pengguna jasa. Berdasarkan PPK tersebut selanjutnya dievaluasi dokumen turunan antara lain form PPK (termasuk data jenis dan jumlah media pembawa, asal negara)

b. Penentuan jumlah PPK/dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor yang dievaluasi

- 1) Jika jumlah PPK impor UPT KIPM berjumlah kurang dari atau sama dengan 10 maka seluruh PPK impor tersebut dilakukan evaluasi

- 2) Jika jumlah PPK impor UPT KIPM lebih dari 10 maka diambil 10 sampel PPK dengan ketentuan mewakili jenis media pembawa, dan tingkat risiko media pembawa
- c. Capaian IKU dihitung secara bertahap, yaitu:
- 1) Menghitung capaian kesesuaian tindakan karantina dan penerbitan dokumen akhir pada satu UPT KIPM dalam satu bulan;
 - 2) Menghitung capaian kumulatif kesesuaian tindakan karantina dan penerbitan dokumen akhir oleh semua UPT KIPM yang terdapat kegiatan impor dalam satu bulan;
 - 3) Menghitung capaian kumulatif kesesuaian tindakan karantina dan penerbitan dokumen akhir oleh semua UPT KIPM yang terdapat kegiatan impor dalam satu triwulan.
- d. Pengukuran capaian IKU efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK untuk satu UPT KIPM dalam satu bulan, dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$E_i = \frac{B_i}{A_i} \times 100\%$$

Keterangan:

A_i = jumlah sampel dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor di UPT KIPM ke-i yang di verifikasi

B_i = jumlah sampel dokumen sertifikasi kesehatan ikan impor di UPT KIPM ke-i yang memenuhi persyaratan karantina berdasarkan hasil verifikasi

E_i = persentase efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK di UPT KIPM ke-i

- d. Pengukuran capaian IKU efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK pada UPT KIPM impor dalam satu bulan

$$E_b = \frac{\sum E_i}{n}$$

Keterangan:

E_b : capaian persentase efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK bulanan

n : jumlah UPT impor yang dievaluasi

E_i : presentase capaian indikator efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK (E) di UPT ke-i

i : 1,2,3,.....n

- e. Pengukuran capaian indikator kinerja efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK dalam satu triwulan

$$Et = \frac{\sum Ebi}{3}$$

Keterangan:

Et : capaian persentase efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK dalam satu triwulan

Ebi : capaian persentase efektivitas pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK bulan ke-i

i : 1,2,3

3. Sumber data

Sumber data pengukuran capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK berasal dari data operasional impor yang diambil dari <http://rekon.bkipm.id/> dan laporan UPT KIPM terkait capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan. Adapun data-data yang dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perkarantinaan ikan adalah:

- a. Data hasil evaluasi PPK impor, mencakup jenis, jumlah dan/atau ukuran dan negara asal media pembawa.

1) Jenis media pembawa bukan merupakan jenis yang dilarang, berbahaya berdasarkan:

- a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, peredaran dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 43/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease*.

2) Asal negara media pembawa menunjukkan bukan merupakan negara yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan bukan termasuk negara asal yang baru pertama kali masuk ke Indonesia tanpa analisis risiko impor, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan;

3) Penilaian risiko pemasukan berdasarkan kategori risiko media pembawa:

- Media pembawa risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan fisik, klinis dan laboratoris
- Media pembawa risiko sedang, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik atau klinis dan/atau laboratoris
- Media pembawa risiko rendah, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik

b. Laporan Hasil Pemeriksaan HPIK, baik Klinis dan/atau Laboratoris (media pembawa risiko tinggi), menunjukkan target HPIK / HPI tertentu dan hasil ujinya.

c. Dokumen akhir yang diterbitkan:

- a. Sertifikat Pelepasan (KI-D12),
- b. Surat Penolakan (KI-D11), atau
- c. Surat Pemusnahan (KI-D13).

4. Target

Target capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK adalah 100%, artinya seluruh media pembawa yang masuk ke Indonesia memenuhi persyaratan karantina ikan, tindakan karantina terhadap media pembawa dan dokumen akhir yang diterbitkan oleh UPT KIPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penanggung jawab IKU

Penanggung jawab capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

B. IKU Persentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan

1. Deskripsi IKU

a. Definisi

- 1) Tindakan karantina impor adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI
- 2) Ketentuan perkarantinaan ikan adalah regulasi yang mengatur ketentuan pemasukan ikan
- 3) Pengukuran persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan, dilakukan dengan membandingkan kesesuaian tindakan karantina impor dengan ketentuan yang berlaku

b. Formula

Rumus perhitungan capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan, yaitu:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{jumlah PPK yang dikenakan tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan}}{\text{jumlah seluruh PPK impor yang terealisasi}} \times 100\%$$

2. Target IKU
Target capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan adalah 100%, artinya seluruh pelaksanaan tindakan karantina ikan yang dilaksanakan oleh UPT KIPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penanggung jawab IKU
Penanggung jawab capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan adalah Kepala UPT KIPM.
4. Sumber data
Sumber data pengukuran capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan adalah data PPK impor, data pelaksanaan tindakan karantina, dan dokumen akhir yang diterbitkan.

BAB III STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

A. Komponen Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKIPM yaitu pelaksanaan tindakan karantina ikan impor yang efektif, dimana Puskar dan UPT yang bertanggung jawab melalui pencapaian target IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK dan IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan, dirumuskan bahwa komponen kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan/ pedoman/ juklak/ juknis/ SOP terkait importasi media pembawa (Pusat);
 2. pelaksanaan Bimtek pemeriksaan HPIK/analisis risiko impor (Pusat);
 3. pembinaan serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan sertifikasi karantina ikan impor (Pusat);
 4. penerapan jejaring laboratorium lintas instansi (Pusat dan UPT KIPM);
 5. penyediaan metode standar pengujian penyakit ikan karantina (Pusat dan BUSKIPM);
 6. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (Pusat dan UPT KIPM);
 7. pengadaan alat dan bahan pemeriksaan laboratorium (UPT KIPM); dan
 8. penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium (UPT KIPM).
- #### B. Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Pencapaian IKU
1. Pelaksanaan di Pusat Karantina Ikan, meliputi:
 - a. Penyusunan draft peraturan/NSPK perkarantinaan ikan impor;
 - b. evaluasi tindakan karantina impor media pembawa;
 - c. Verifikasi, analisis dan penelusuran ketidak sesuaian terhadap tindakan karantina yang dilaksanakan UPT KIPM pada importasi media pembawa;
 - d. Rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data sertifikasi impor (<http://rekon.bkipm.id/rekon/>);
 - f. Monitoring dan evaluasi (monev) perkarantinaan ikan impor di UPT KIPM; dan
 - g. Penyusunan laporan kinerja triwulan dan tahunan.
 2. Pelaksanaan di UPT KIPM, meliputi:
 - a. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap pemasukan media pembawa (8P);
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Karantina, khususnya yang melakukan analisis terhadap pelaporan (PPK) impor;
 - c. Penyusunan matrik target pemeriksaan HPIK pada importasi media pembawa;
 - d. Pengadaan alat dan bahan pemeriksaan HPIK;
 - e. Pemutakhiran dokumen mutu laboratorium;
 - f. Kalibrasi peralatan laboratorium;
 - g. Sub kontrak pengujian, uji banding dan uji profisiensi;
 - h. Kerjasama pengujian penyakit ikan, penggunaan bahan dan alat laboratorium;
 - i. Rapat koordinasi operasional perkarantinaan ikan dengan instansi terkait; dan
 - j. Penyusunan laporan.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Sertifikasi kesehatan ikan dan hasil perikanan yang bebas HPIK pada kegiatan pemasukan impor ikan dan hasil perikanan dilakukan terhadap setiap pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK, Puskari melaksanakan evaluasi terhadap data tindakan karantina di UPT KIPM yang terdapat kegiatan impor media pembawa. Untuk memudahkan dalam memperoleh data evaluasi tindakan karantina impor, Tim Pusat mengumpulkan data capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan yang dilaksanakan oleh UPT, dan juga melakukan pengunduhan data dari sistem informasi karantina ikan secara melalui website <http://rekon.bkipm.id>. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan laporan capaian IKK per triwulan dan bahan rekomendasi perbaikan pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan impor di UPT KIPM.

A. Format Pelaporan

Format data sampling dituangkan dalam lembar evaluasi tindakan karantina ikan impor untuk pengukuran IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK sebagaimana Lampiran 1 dan lembar data tindakan karantina ikan impor untuk pengukuran IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan sebagaimana Lampiran 2. Laporan capaian IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK yang disusun setiap triwulan terdiri dari sebagaimansa Lampiran 3.

B. Waktu Pelaporan

Pengukuran capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan dilaksanakan setiap bulan. Hasil pengukuran capaian IKU persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan disajikan menggunakan form pengukuran capaian IKU sebagaimana pada lampiran 2, disampaikan dalam format excel ke Puskari paling lambat tanggal 7 setiap bulan melalui alamat surat elektronik eksotik.pmr@gmail.com. Laporan triwulan IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK disusun selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Penetapan IKU efektivitas pencegahan HPIK dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK sebagai salah satu IKU dalam perjanjian kinerja Puskari menunjukkan bahwa IKU ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskari. Kemudian penetapan persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan sebagai salah satu IKU dalam penetapan kinerja UPT KIPM menunjukkan bahwa IKU ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT KIPM. Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Efektivitas Pencegahan HPIK dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK dan IKU Persentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan akan menjadi acuan bagi Puskari dan UPT KIPM dalam upaya memenuhi IKU dan melakukan pengukuran capaian IKU tersebut. Diharapkan dengan Petunjuk Teknis ini, Puskari dan UPT KIPM dapat bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada akhirnya capaian target kedua IKU tersebut menjadi gambaran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BKIPM terkait penyelenggaraan perkarantinaan ikan impor.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

Lampiran 2. Lembar Data Tindakan Karantina Impor UPT KIPM

Daftar Pelaporan Impor Bulan 2023

Balai Besar / Balai / Stasiun KIPM.....

No.	No. PPK	Jenis MP	Negara asal	Memenuhi ketentuan perkarantinaan berdasarkan PermenKP Nomor 11 tahun 2019							Tindakan Karantina yang dilakukan								Keterangan	sesuai/tidak dengan ketentuan	
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Penjelasan

- 1 K1 : HC dari negara asal/transit
- 2 K2 : Tempat pemasukan telah ditetapkan
- 3 K3 : CoO
- 4 K4 : CoA
- 5 K5 : fotocopi SIKI
- 6 K6 : invoice/ packing list
- 7 K7 : catch certificate
- 8 P1-P8 : 8 tindakan karantina
- 9 Kolom 1 - 4 : diisi sesuai judul kolom
- 10 Kolom 5 - 19 : beri tanda √, sesuai kelengkapan persyaratan impor yang tersedia
- 11 Kolom 12 - 19 : beri tanda √ tindakan karantina yang dilakukan diantara P1-P8
- 12 Kolom 20 : tambahan keterangan terkait jenis pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan HPIK, nomor dokumen karantina yang diterbitkan

Lampiran 3. Format Laporan Triwulan Capaian IKU Efektivitas Pencegahan HPIK dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pada Kegiatan Importasi Media Pembawa HPIK

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN HPIK DAN PENGAWASAN DAN/ATAU
PENGENDALIAN PADA KEGIATAN IMPORTASI MEDIA PEMBAWA
TRIWULAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

BAB II METODOLOGI

- A. Target Capaian IKU
- B. Tolok Ukur Keberhasilan
 - 1. Sampling Data
 - 2. Cara Penghitungan

BAB III HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil
- B. Evaluasi dan Pembahasan
- C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

BAB IV KESIMPULAN